

Harapan dari RAPBN 2010

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang paripurna DPR kemarin memberi harapan akan berlanjutnya perbaikan ekonomi di Tanah Air.

Para pelaku pasar menyambut positif paparan RAPBN itu, sehingga mendorong indeks di Bursa Efek Indonesia dan nilai rupiah kemarin. Indeks Harga Saham Gabungan ditutup naik 0,67 persen atau 15.561 poin pada 2.338,797. Sementara kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot antarbank Jakarta naik 10 poin menjadi Rp9.910-Rp 9.920 per dollar AS dibanding penutupan akhir pekan lalu Rp9.920-Rp 9.935.

Asumsi-asumsi dan target-target makro ekonomi yang disampaikan Presiden cukup realistis. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 5 persen, tingkat inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp10 ribu per dolar AS, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan rata-rata 6,5 persen, harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional US\$60 per barel, dan lifting minyak mentah Indonesia diharapkan dapat mencapai 965 ribu barel per hari.

Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp911,5 triliun, meningkat Rp38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp1.009,5 triliun, lebih tinggi Rp3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P 2009.

Defisit anggaran tahun 2010 direncanakan Rp98,0 triliun (1,6 persen dari PDB). Jumlah ini menurun Rp35,0 triliun dibandingkan target dalam RAPBN-P 2009 sebesar Rp133,0 triliun (2,5 persen dari PDB).

Pemerintah akan menjamin berlanjutnya kebijakan ekonomi untuk menghadapi krisis finansial global yang diperkirakan masih berlanjut hingga tahun depan. Kebijakan countercyclical untuk membalikkan siklus ekonomi yang sedang menurun, ke arah yang lebih positif akan dilanjutkan.

Stimulus fiskal sebagai kebijakan countercyclical dilakukan dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga daya tahan perusahaan/sector usaha, serta menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak pemutusan hubungan kerja melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 dengan tema "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat", memiliki lima agenda program pembangunan nasional. Pertama, pemeliharaan kesejahteraan rakyat utamanya masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ketiga, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional. Keempat, pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi. Kelima, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Meski berbagai kalangan menilai RAPBN 2010 itu cukup realistis, rencana itu masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kita berharap, para anggota Dewan dapat mempertajam berbagai RAPBN tersebut sehingga lebih baik dan bisa terlaksana seperti yang ditargetkan.

Implementasi anggaran dan kebijakan itu harus mendapat perhatian serius karena sering kali apa yang direncanakan tidak bisa dilaksanakan dengan baik guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Selama ini, pembangunan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja di daerah-daerah belum berjalan sesuai target, meski sudah ada transfer dana APBN yang lebih besar ke daerah-daerah. Dana-dana itu tidak terserap menjadi investasi produktif di daerah, malah kembali ditanam ke pusat dalam bentuk SBI.

Kalau sisi pelaksanaan tidak dibenahi, peningkatkan belanja pembangunan infrastruktur sebesar Rp48,9 triliun atau 63,5 persen dari total belanja modal 2010 yang mencapai Rp76,9 triliun, tidak banyak manfaatnya.

Sumber : jurnalnasional.com